



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PENDAFTARAN DOKUMEN  
PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PERTANAHAN MELALUI SISTEM  
KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP)  
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**



**KHAIRUNISA AZZAHRA**

**NIM : 1905311087**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan

Diploma III Politeknik

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2022**



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Khairunisa Azzahra  
NIM : 1905311087  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pendaftaran Dokumen  
Permohonan Pertimbangan Teknis  
Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi  
Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok

Depok, 10 Agustus 2022

Pembimbing I

**Yanita Ella N. C., S.Ab., M.Si**  
NIP. 199001042019032026

Pembimbing II

**Taufik Akbar, S.E., M.S.M**  
NIP. 198409132018031001



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

**Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si**  
NIP. 196501311989032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Khairunisa Azzahra  
NIM : 1905311087  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pendaftaran Dokumen  
Permohonan Pertimbangan Teknis  
Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi  
Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Agustus 2022  
Waktu : 13.00 WIB – 14.00 WIB

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Yanita Ella N. C., S.Ab., M.Si  
NIP. 199001042019032026

Penguji I : Risya Zahrotul Firdaus, S.I.Kom., M.Si  
NIP. 199001042019032026

Penguji II : Riza Hadikusuma, M.Ag  
NIP. 197404032001121002



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok”**.

Penyusunan laporan tugas akhir ini merupakan syarat kelulusan untuk Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Jakarta. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk laporan kerja lapangan atau laporan karya ilmiah. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M., selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta dan dosen pembimbing teknis yang telah mengoreksi penulisan tugas akhir ini sehingga penulisan laporan tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi.
4. Yanita Ella N.C., S.Ab., M.Si, selaku dosen pembimbing materi tugas akhir yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta terutama dosen pengajar pada Program Studi Diploma 3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kantor Pertanahan Kota Depok, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk magang sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik.
7. Pegawai Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok yang telah membimbing dan memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk penulis selama magang di Kantor Pertanahan Kota Depok.
8. Kedua orang tua yaitu Sri Wahyuni dan Teguh Widodo, serta adik tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti.
9. Atilah Tia Abelta, sebagai sahabat yang selalu membantu dan menyemangati penulis serta selalu memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Administrasi Bisnis D angkatan 2019 yang sangat hebat karena sudah berjuang sampai di titik ini, terima kasih atas pengalaman suka dan duka serta selalu berbagi cerita selama mengerjakan tugas akhir.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan laporan tugas akhir ini diwaktu yang akan datang. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Depok, 22 Mei 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.6 Metode Analisis Data .....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Prosedur.....	8
2.1.1 Tujuan Prosedur.....	9
2.1.2 Manfaat Prosedur .....	10
2.1.3 Karakteristik Prosedur.....	11
2.2 Pertimbangan Teknis Pertanahan .....	12
2.2.1 Jenis-jenis Pemohon Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	12
2.2.2 Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan ....	13
2.3 Pengertian Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan .....	14
2.4 Pengertian Sistem Informasi.....	14
2.5 Pengertian Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).....	15
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>17</b>

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1	Sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia ..	17
3.2	Sejarah Kantor Pertanahan Kota Depok.....	18
3.3	Visi dan Misi Instansi .....	18
3.3.1	Visi Instansi .....	18
3.3.2	Misi Instansi.....	18
3.4	Logo Instansi .....	19
3.5	Struktur Organisasi Instansi.....	20
3.6	Fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
4.1	Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.....	22
4.2	Hambatan dalam Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.....	47
4.3	Solusi untuk mengatasi Hambatan dalam Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) .....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>56</b>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Teori dan Pelaksanaan Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) .....	44
--	----







Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Badan Pertanahan Nasional .....	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok .....	20
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) .....	23
Gambar 4.2 Masuk ke Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) .....	25
Gambar 4.3 Tampilan setelah Masuk ke Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) .....	26
Gambar 4.4 <i>Menu Bar</i> Loker Pelayanan .....	26
Gambar 4.5 Menu Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan .....	27
Gambar 4.6 Entri Berkas .....	27
Gambar 4.7 Menu Pilih Dokumen: Identitas Diri Pemegang Hak, Penerima Hak dan atau kuasanya .....	28
Gambar 4.8 Tampilan Menu Identitas Diri Pemegang Hak, Penerima Hak dan atau kuasanya .....	28
Gambar 4.9 Cek Dukcapil Penerima Kuasa .....	29
Gambar 4.10 Tampilan Cek Dukcapil Penerima Kuasa .....	29
Gambar 4.11 <i>Upload PDF</i> Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....	30
Gambar 4.12 Tampilan Data Pemohon/Penerima Kuasa .....	31
Gambar 4.13 Tampilan Menu Pemberi Kuasa .....	31
Gambar 4.14 Tampilan Entri Data Baru Pemberi Kuasa .....	32
Gambar 4.15 Pilih File Pemberi Kuasa .....	32
Gambar 4.16 <i>Upload PDF</i> Fotokopi Akta Pendirian .....	33
Gambar 4.17 Tampilan Data Pemberi Kuasa .....	34
Gambar 4.18 Menu Pilih Dokumen: Surat Keterangan Lokasi .....	34
Gambar 4.19 Tampilan Menu Surat Keterangan Lokasi .....	35
Gambar 4.20 <i>Upload PDF</i> Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)....	35
Gambar 4.21 Tampilan Data Lokasi yang Dimohon .....	36



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4.22 Menu Pilih Dokumen: Sertipikat Hak Atas Tanah.....	36
Gambar 4.23 Tampilan Menu Sertipikat Hak Atas Tanah.....	37
Gambar 4.24 Tampilan Informasi Sertipikat Hak Atas Tanah .....	37
Gambar 4.25 Tampilan Informasi Sertipikat Hak Atas Tanah .....	38
Gambar 4.26 <i>Upload PDF</i> Fotokopi Sertipikat Hak Guna Atas Bangunan (SHGB) .....	38
Gambar 4.27 Tampilan Data Sertipikat Hak Atas Tanah .....	39
Gambar 4.28 Menu Pilih Dokumen: Kelengkapan Berkas Lainnya.....	39
Gambar 4.29 Tampilan Menu Kelengkapan Berkas Lainnya.....	40
Gambar 4.30 Tampilan Menu Cetak.....	41
Gambar 4.31 Menu Cetak Tanda Terima Dokumen (STTD) .....	41
Gambar 4.32 Tampilan Cetak Tanda Terima Dokumen (STTD) .....	42
Gambar 4.33 Menu Cetak Surat Perintah Setor (SPS).....	42
Gambar 4.34 Tampilan Cetak Surat Perintah Setor (SPS).....	43
Gambar 4.35 Pendaftaran Selesai .....	43

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	56
Lampiran 2 <i>Voice Record</i> Wawancara dengan Narasumber.....	57
Lampiran 3 Formulir Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	58
Lampiran 4 Persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	59
Lampiran 5 Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan .....	60
Lampiran 6 Peta/Sketsa Lokasi yang Dimohon .....	61
Lampiran 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....	62
Lampiran 8 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	63
Lampiran 9 Fotokopi Akta Pendirian.....	64
Lampiran 10 Fotokopi Lampiran Izin Usaha dari OSS .....	65
Lampiran 11 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) .....	66
Lampiran 12 Fotokopi Akta Jual Beli.....	67
Lampiran 13 Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	68
Lampiran 14 Proposal Rencana Kegiatan .....	69
Lampiran 15 Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).....	70
Lampiran 16 Surat Perintah Setor (SPS).....	71



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan secara merata di segala sektor sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang. Akan tetapi, pada implementasinya masih sering ditemukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang merugikan masyarakat. Apabila pembangunan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek penting yang mendukung kehidupan manusia, maka pembangunan tersebut akan mensejahterakan masyarakat. Namun sebaliknya, apabila kegiatan pembangunan tidak dilakukan dengan baik dan menyalahi aturan yang berlaku maka pembangunan tersebut dapat menjadi bumerang yang akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan sebaik mungkin agar menjadi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Memperlakukan lingkungan alam yang dalam hal ini adalah tanah dengan kapasitas yang terbatas agar tetap dapat mengalokasikan sumber dayanya secara adil, lestari, dan menjamin kesejahteraan masyarakat antar generasi menjadi pertanyaan yang sering timbul dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan dan pengendalian struktur ruang dan pola ruang yang ada sangat diperlukan sehingga tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dan pelaksanaan pembangunan dapat dengan efektif mengarah ke pembangunan berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berperan dalam pengaturan dan pengendalian struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Salah satu wujud pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah tata guna tanah. tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, dan penggunaan tanah secara berencana dan rasional dalam rangka melaksanakan pembangunan baik yang digagas oleh pemerintah maupun yang berasal dari inisiatif dan swadaya masyarakat.

Salah satu kegiatan di bidang pertanahan yang terkait dengan penyelenggaraan tata guna tanah adalah pertimbangan teknis pertanahan. Pertimbangan teknis pertanahan digunakan oleh pemohon sebagai rekomendasi yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan izin lokasi/penetapan lokasi/izin perubahan penggunaan tanah. Namun, sebelum masuk ke tahap penyusunan dan penerbitan, pemohon pertimbangan teknis pertanahan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan melewati tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) sebagai syarat pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen ini masih dilakukan secara manual. Sehingga jika dokumen-dokumen yang dibawa oleh pemohon belum memenuhi persyaratan yang ada, maka pemohon harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan terlebih dahulu untuk kemudian masuk ke tahap pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan. Pemohon juga dianjurkan untuk menyiapkan hasil *scan* dari dokumen-dokumen persyaratan tersebut dalam format *Portable Document Format (PDF)*, sehingga nantinya dapat mempermudah petugas loket di tahap pendaftaran.

Pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2), pegawai yang menjadi petugas loket untuk mendaftarkan dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan tersebut hanya berjumlah satu orang, selain itu tidak ada *manual book* atau panduan yang memuat prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan secara terperinci sehingga tidak semua pegawai dapat menjadi petugas loket untuk memproses pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pertanahan. Petugas loket yang hanya berjumlah satu orang ini pun harus mempelajari dan memahami prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan secara otodidak dan hanya bersumber pada informasi yang didapatkan dari petugas loket sebelumnya. Sehingga, jika pegawai tersebut berhalangan untuk hadir ke kantor maka pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan tidak dapat diproses. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses pendaftaran karena pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan dilakukan secara *online* melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) serta membahas dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pendaftaran Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok?
- c. Apa saja solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor

Pertanahan Kota Depok?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.
- c. Untuk memberikan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini bagi penulis yaitu penulis dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori terkait prosedur administrasi yang sudah dipelajari selama kuliah dengan pelaksanaannya di salah satu bagian di dalam instansi, khususnya pada pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok.

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir ini bagi instansi yaitu penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Depok dalam menjalankan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang. Selain itu, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memberi wawasan bagi pembaca dan digunakan sebagai bahan pembelajaran terutama di bidang administrasi, serta sebagai bahan referensi bagi yang ingin mengambil judul tugas akhir yang sama untuk selanjutnya.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan bahan serta data dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada saat praktik kerja lapangan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) pada Kantor Pertanahan Kota Depok.

b. Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan pegawai Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) untuk mengetahui prosedur pendaftaran yang dilakukan, serta untuk mengetahui pemecahan masalah dari hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan segala bentuk informasi di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) untuk dijadikan acuan pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini.

### 1.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan di Seksi Penataan dan





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemberdayaan (P2) dari data-data yang sudah diperoleh penulis melalui wawancara, observasi, dokumentasi, untuk kemudian dianalisis berdasarkan kajian teori agar mendapatkan deskripsi yang dipergunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, maka penulis menguraikan garis besar dari tugas akhir ini. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dibahas, diantaranya adalah terkait pengertian prosedur, tujuan prosedur, manfaat prosedur, karakteristik prosedur, pengertian pertimbangan teknis pertanahan, pengertian pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan, pengertian sistem informasi, dan pengertian Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

#### **Bab III : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi, di antaranya sejarah Badan Pertanahan Nasional, sejarah Kantor Pertanahan Kota Depok, visi dan misi instansi, logo instansi, struktur organisasi instansi, fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2), serta informasi lainnya mengenai Kantor Pertanahan Kota Depok.

#### **Bab IV : Pembahasan**

Bab ini menguraikan data-data yang diperoleh selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL), yaitu mengenai prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok

di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) beserta hambatan apa saja yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

## Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam laporan tugas akhir ini dan memberikan saran agar instansi dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang dilaksanakan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok yang sudah dikemukakan dalam bab IV, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok sudah berjalan dengan cukup baik. Tahapan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dimulai dari pemohon yang datang langsung ke Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok dengan membawa permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang sudah diisi dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon. Jika dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon sudah lengkap, maka petugas loket akan mendaftarkan permohonan pertimbangan teknis pertanahan ke dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan mencetak Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) serta Surat Perintah Setor (SPS) menggunakan *continuous form* berukuran A4 (21 cm × 29.7 cm) yang memiliki 3 lapisan berwarna putih, merah, dan kuning.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Depok adalah jaringan internet yang sering tidak stabil, *server down* pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), dokumen persyaratan masih kurang lengkap dan tidak menyiapkan *file* dokumen-dokumen persyaratan tersebut dalam format *Portable Document Format* atau *PDF*, serta tidak adanya buku panduan yang bisa dijadikan pedoman.

- c. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu pengecekan jaringan internet secara berkala dan menjelaskan secara lebih lengkap serta mengingatkan kembali kepada pemohon agar dokumen-dokumen persyaratan tersebut juga *discan* dan disimpan dalam format *Portable Document Format* atau *PDF*.

## 5.2 Saran

Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2), penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan instansi di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

- a. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya meningkatkan kualitas jaringan internet dan mengganti perangkat komputer yang digunakan, karena masih banyak perangkat komputer model lama yang memiliki spesifikasi rendah sehingga terkadang perangkat komputer mengalami *error* jika digunakan terlalu lama untuk melakukan banyak pekerjaan. Selain itu jaringan internet pada Kantor Pertanahan Kota Depok harus terus ditingkatkan karena untuk mengakses sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dibutuhkan jaringan internet yang stabil sehingga sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dapat diakses dengan lancar dan pelayanan pertanahan kepada para pemohon menjadi lebih baik dan tepat waktu.
- b. Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) juga seringkali mengalami *server down* sehingga menghambat proses pelayanan



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pertanahan karena sistem ini digunakan oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia, maka dari itu setiap kantor pertanahan di Indonesia hendaknya melakukan *server maintenance* atau pemeliharaan server secara rutin dan peningkatan layanan *hosting* oleh tenaga ahli sehingga frekuensi *server down* pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

- c. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya membuat buku panduan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan karena buku panduan tersebut dapat menjadi pedoman kerja bagi pegawai lain untuk menggantikan petugas loket jika petugas loket sedang tidak hadir ke kantor. Selain itu jika ada pergantian atau pertukaran posisi pegawai antar seksi, maka buku panduan tersebut tentu akan bermanfaat bagi pegawai yang menjadi petugas loket berikutnya karena pegawai tersebut dapat mempelajari prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tanpa harus mengandalkan petugas loket sebelumnya.
- d. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya menambah jumlah pegawai petugas loket pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) dan melakukan pembinaan kepada petugas loket tersebut terkait dengan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga berkas pendaftaran permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang diajukan oleh pemohon tidak terbengkalai serta dapat diproses dengan lebih cepat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, Rizki Ahmad. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Yogyakarta: Deepublish.

Nuraida, Ida. 2014. *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.

Rahmawati, Imelda Dian dan Sumarno. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.

Rosilawati, Ina. 2013. *Memahami dan Terampil Melakukan Prosedur Administrasi*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.

Rusdiana, A dan Qiqi Yulianti Zaqiah. 2014. *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: Insan Komunika.

Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: CV Mandar Maju.

Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.

### Peraturan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Internet:

Dokumen. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokumen>. Diakses 15 Agustus 2022.

Pendaftaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pendaftaran>. Diakses 8 Juli 2022.

Permohonan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Permohonan>. Diakses 8 Juli 2022.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

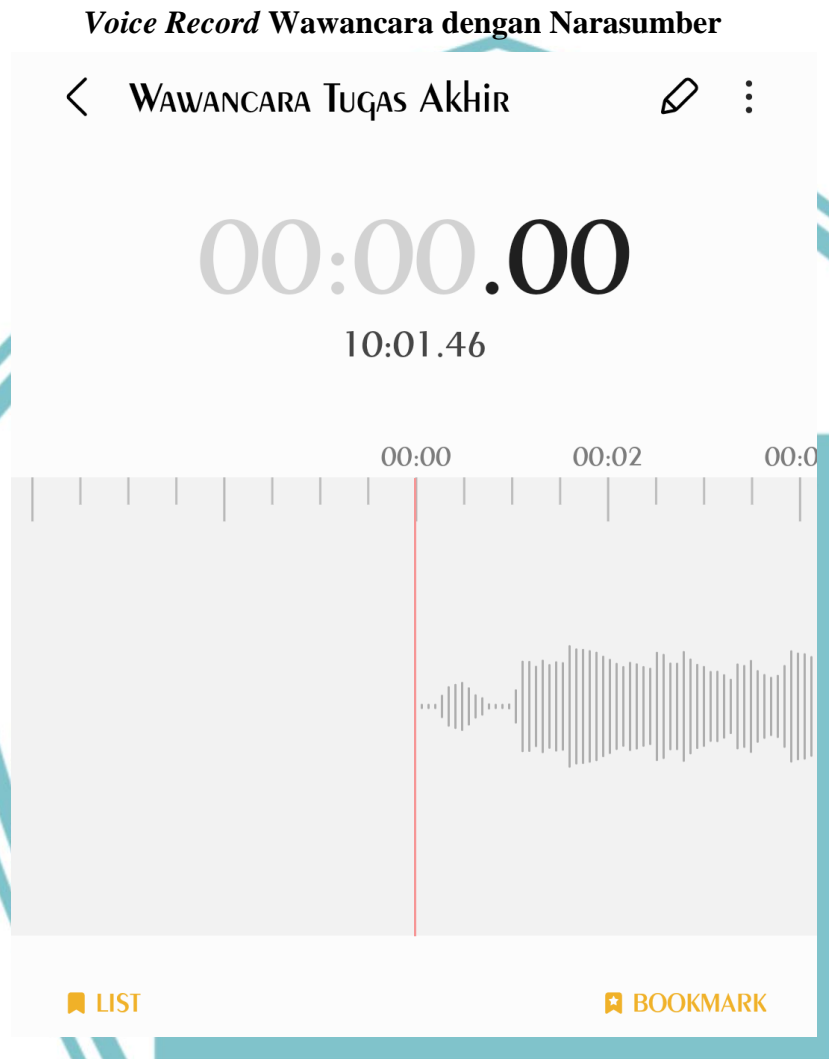
1. Bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?
2. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?
4. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA





Lampiran 2



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3

Formulir Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan

**PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok  
di tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....

Nomor Induk Berusaha (NIB) \*) : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....

\*) untuk pemohon Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB  
dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan: \*\*)

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
2. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
3. Penyelenggaraan Kebijakan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

\*\*) pilih salah satu

Rencana Kegiatan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : .....,  
Kode dan nama KBLI\*\*\*) : .....,  
\*\*\*) Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (untuk pemohon pelaku usaha)  
dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak tanah yang dimohon
  - a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
  - b. Desa/Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan, Kab/Kota : .....
2. Luas tanah yang dimohon : .....
3. Status/penguasaan tanah : .....
4. Penggunaan tanah saat ini : .....

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (untuk badan hukum)
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) (untuk pemohon Pelaku Usaha apabila sudah memiliki NIB)
7. Bukti Perolehan Hak Atas Tanah
8. Proposal rencana kegiatan berusaha (untuk pelaku usaha)
9. Bukti Pendukung Lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

.....

Pemohon,

(.....)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4

## Persyaratan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanian

### Persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanian dalam rangka Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah :

1. Formulir Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanian [\[PDF\]](#)
2. Foto Copy KTP Pemohon [\[PDF\]](#)
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS [\[PDF\]](#)
4. Izin Usaha Perusahaan dari OSS [\[PDF\]](#)
5. Foto Copy NPWP Perusahaan [\[PDF\]](#)
6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahaannya [\[PDF\]](#)
7. Foto Copy Akta Perubahan Perusahaan dan Pengesahaannya [\[PDF\]](#)
8. Foto copy Sertipikat [\[PDF\]](#)
9. Foto Copy Peralihannya (Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Pelepasan/dll...) [\[PDF\]](#)
10. Proposal Rencana Kegiatan [\[PDF\]](#)
11. Sket Lokasi yang diohon [\[PDF\]](#)
12. SPPT PBB [\[PDF\]](#)
13. Lampirkan alamat Email dan no. Tlp. Pemohon

**Catatan : scan berkas 1 file PDF perberkas (Jangan digabung scan berkasnya)**

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 5

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan

**BANK JASA JAKARTA** PT. BANK JASA JAKARTA  
 Jl. Tiang Bendera III No. 26-32  
 Jakarta 11230  
 Phone : (021) 6902644  
 Fax : (021) 6902643 & 6902031  
 Email : bj@bj.co.id  
 Web : www.bj.co.id

**PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN**

Kepada Yth,  
**Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**  
 Di Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BUDI WIDYADI dan SURJANI**  
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [REDACTED] dan [REDACTED]  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220300762177  
 Alamat : Jalan Tiang Bendera III nomor 26-30, Roa Malaka,  
 Tambora, Jakarta Barat  
 Bertindak untuk dan atas nama : **PT BANK JASA JAKARTA,**  
 Berkedudukan di Jakarta Barat

-Dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan :  
 -Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,  
 -Penyelenggaraan Kebijakan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan  
 -Rencana Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Rumah Hunian / rumah tinggal karyawan.  
 -Kode dan nama KBLI : KBLI : 64121 – Bank Umum Konvensional

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak tanah yang dimohon :
  - a. Jalan, nomor, RT/RW : Perumahan Sawangan Village Blok E8/1
  - b. Desa / Kelurahan : Bedahan
  - c. Kecamatan, Kota : Sawangan
2. Luas tanah yang dimohon : 225 m<sup>2</sup>
3. Status / penguasaan tanah : Hak Guna Bangunan
4. Penggunaan tanah saat ini : Rumah Hunian / Rumah Tinggal Karyawan.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon;
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

KCP Mangga Dua	☎ 6011401	KCP Gajah Mada	☎ 6332668	KCP Muara Karang	☎ 6626677	KK RS. Gading Putih	☎ 45866
KCP Tanah Abang	☎ 3156608	KCP Glodok Plaza	☎ 6280202	KCP BSD	☎ 5376999	KK Sentul	☎ 87950
KCP Kelapa Gading	☎ 4529050	KCP Kebon Jeruk	☎ 5329511	KCP Cimone	☎ 55770145	KK Bandara Benda	☎ 55911
KCP Fatmawati	☎ 7210560	KCP Matraman	☎ 85918033				

### Peta/Sketsa Lokasi yang Dimohon



**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Lampiran 6

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)



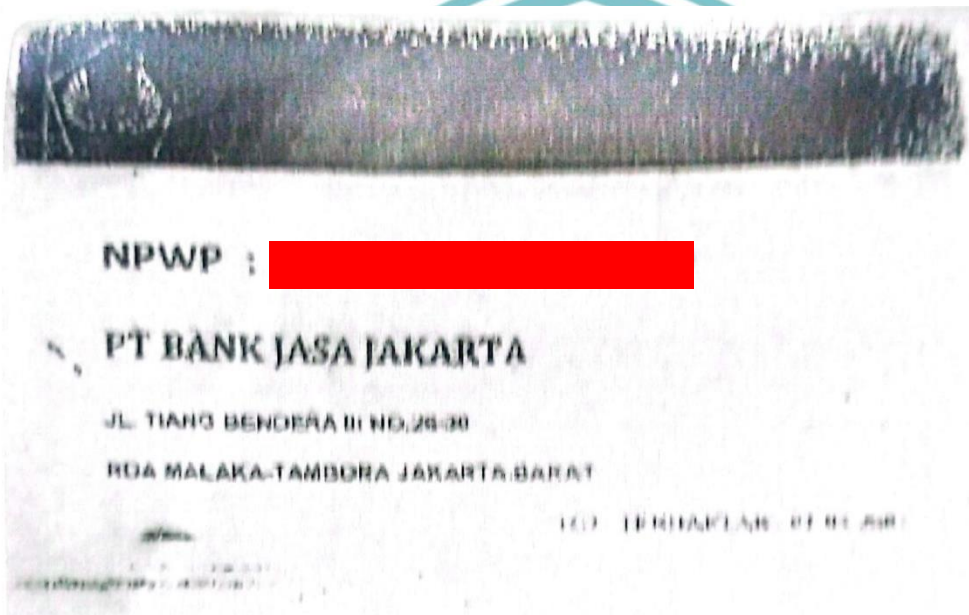
POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 8

## Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 9

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Fotokopi Akta Pendirian

NO. 126



1988



PERSEROAN<sup>1</sup> TERBATAS,  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 2/2 — 1988 No. 10.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.

"P.T. BANK — PASAR WARGA GROGOL".

Nomor 19.

Hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh tiga Maret seribu sembilan-ratus tujuh puluh satu.

Menghadap dihadapan saja, Andjar Djarkasih, atas kekuatan surat-ketetapan Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta, tertanggal tudjuhbelas Pebruari seribu sembilanratus tudjuh puluh satu nomer 273/1971 P., pengganti Soedjono, notaris di Jakarta, dengan di-hadiri oleh para saksi jang disebut dibawah ini dan jang dikenal oleh saja, notaris :

1. tuan Kawat Lumban Tobing, partikelir, bertempat-tinggal di Djakarta, Djalan Tjipinang Tjempedak II nomer 50-A; menurut keterangannya dalam hal ini mendjalani :
  - a. untuk diri sendiri;
  - b. sebagai ayah- dan oleh karena itu sebagai jang melakukan kekuasaan orangtua atas- dan oleh karena itu bertindak untuk- dan atasnama anak-anaknya jang belum dewasa ber-nama :





Lampiran 10

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Fotokopi Lampiran Izin Usaha dari OSS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 LAMPIRAN  
 NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220300762177

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	64121	Bank Umum Konvensional	Jl. Tiang Bendera III No. 26 - 32 , Desa/Kelurahan Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11230	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11

### Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

GUNA BANGUNAN	
<b>MILIK PENDAFTARAN - PERTAMA</b>	
<b>1) HAK</b> a. <b>NO.</b> 00000/1585 b. <b>Dusun / Kel.</b> BEDAHAN c. <b>Tgl berakhiran</b> 22-02-2016 d. <b>NIB</b> 10.27.02.02.05638 e. <b>Letak Tanah</b> BLOK EB/1	<b>0) NAMA PEMEGANG HAK</b> PT. PATRIASAND UTAMA DEKOROPRIMA Berkedudukan di Jakarta Tanggal diterbit / akta pendirian:
<b>3) ASAL HAK</b> 1. <u>Konsumen</u> 2. <u>Pembelian hak</u> 3. <u>Dipisahkan / Pemisahan / Penggabungan bidang</u> B.2/ BEDAHAN	<b>2) PEMBUKUAN</b> Depok Tgl 17-08-2014 Kepala Kantor Penanahan Kabupaten / Kota DEPOK Ud
<b>d) DASAR PENDAFTARAN</b> 1. <b>Daftar Isian 202</b> Tgl. _____ No. _____ 2. <b>Surat Keputusan</b> Tgl. _____ No. _____ 3. <b>Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b> Tgl. _____ No. _____	<b>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</b> Depok Tgl 0-08-2014 Kepala Kantor Penanahan Kabupaten / Kota DEPOK  <b>DADANG M. FUAD, SH</b> NIP. 19850711 199003 1 002
<b>e) SURAT UKUR</b> Tgl. 23-06-2014 No. 00232/BEDAHAN/2014 Luas: Meter Persegi 225 M2 (Dua Ratus Dua Puluh Lima)	<b>DADANG M. FUAD, SH</b> NIP. 19850711 199003 1 002
<b>1) PENUNJUK</b> - Daftar Isian 301 No. 6351 Tanggal 06-02-2014.	

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 12

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Fotokopi Akta Jual Beli

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**ROBBYSON HALIM, SH, MKn.**

DAERAH KERJA : KOTA DEPOK  
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013

Tanggal 20 Nopember 2013

Kompleks Permata Cimanggis, Ruko Ruby Blok EE Nomor 7  
Jalan Raya Tapos, Cimpaeun Tapos, Kota Depok - 16459  
Telp : 081 293 293 56



**AKTA JUAL BELI**

Nomor : **38 / 2021**  
Lembar Pertama

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).  
hadir dihadapan saya **ROBBYSON HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Nopember 2013 Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Depok dan berkantor di Kompleks Permata Cimanggis, Ruko Ruby Blok EE Nomor 7 Jalan Raya Tapos, Cimpaeun Tapos, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- 1.1. **Tuan BUDI WIDYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 2-12-1976 (dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kemurnian Utara nomor 3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED] ;
2. **Nyonya SURJANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-09-1967 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok N II nomor 6, Rukun Tetangga 045, Rukun Warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED]

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Depok. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Akta Kuasa, yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN

Akta Jual Beli  
ROBBYSON HALIM, SH, MKn  
Daerah Kerja : Kota Depok

Halaman 1 dari 6 halaman

Handwritten signature/initials: RB



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 13

### Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
BADAN KEUANGAN DAERAH

21-0128860  
SPPT PBB  
BUKAN MELUKAKAN BUKTI KEPEMILIKAN PBB

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NOP

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
KOR. BAWANGAN + TLEKAD E. 011 RT. 004 RW. 02 DEPOK KABUPATEN KOTA DEPOK		DEWI PRATI Jl. JORJA 41-42 RT. 001 RW. 05 CEREBE JALAN JAKARTA SELATAN		
OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	235	044	3.735.000	878.625.000
BANGUNAN	129	031	1.000.000	129.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 1.008.625.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 1.008.625.000 NJOP untuk penghitungan PBB = 0 Tarif = 0 PBB yang Terhutang = 0				
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)</b> PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR SEBANYAK LIMA RIBU RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO 31 MARET 2021		DEPOK - JAWA BARAT		
TEMPAT PEMBAYARAN : TEMPAT DAN WAKTU PEMBAYARAN SUKSES KEMENTERIAN PERUMAHAN SUKSES KEMENTERIAN PERUMAHAN JEDONGKONG KANTOR POS JEDONGKONG KANTOR POS JEDONGKONG KANTOR POS JEDONGKONG KANTOR POS				
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan BAWANGAN Kelurahan BEBANAH NOP : SPTI Tanah/Pl :		Diterima Igl : Tanda Tangan : Nama Terang :		

**SALINAN**

NEGERI  
JAKARTA

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 14

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Proposal Rencana Kegiatan

**PT. BANK JASA JAKARTA**  
 Jl. Tiang Bendera III No. 26-32  
 Jakarta 11230  
 Phone : (021) 6902611  
 Fax : (021) 6902619 & 6902031  
 Email : bj@bj.co.id  
 Web : www.bj.co.id

**PROPOSAL RENCANA KEGIATAN**

Nama : **PT BANK JASA JAKARTA**  
 Alamat : **Jalan Tiang Bendera III nomor 26-32, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat**

**-LEGALITAS PERUSAHAAN :**

-Yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam.

- a. Akta, yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, selaku Notaris di Jakarta, masing-masing :
  - tertanggal 8-12-2017 (delapan Desember dua ribu tujuh belas) nomor 52, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaannya tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0200504 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0026291.AH.01.02.Tahun 2017 ; dan
  - tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan belas) nomor 102, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaannya tertanggal 29-10-2018 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0258270.
- b. Akta, yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, masing-masing :
  - tertanggal 29-7-2019 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan belas) nomor 227, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaannya tertanggal 6-8-2019 (enam Agustus dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0308870.
  - tertanggal 17-7-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 168, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-7-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-0051227.AH.01.02.Tahun 2020.
  - tertanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh satu) nomor 136, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaannya tertanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0474398.

**TENTANG PT BANK JASA JAKARTA**

**-PT BANK JASA JAKARTA** selaku BANK yang melakukan usaha di bidang Bank Umum, menghadirkan solusi bagi kebutuhan keuangan para nasabahnya dan tetap menjaga dan mempertahankan pencapaian kinerja keuangan yang positif.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit atau pinjaman;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

KCP Mangga Dua	☎ 6011401	KCP Gajah Mada	☎ 6332668	KCP Muara Karang	☎ 6626677	KK RS. Gading Pluit	☎ 45866451
KCP Tanah Abang	☎ 3156608	KCP Glodok Plaza	☎ 6280202	KCP BSD	☎ 5376999	KK Sentul	☎ 87950621
KCP Kelapa Gading	☎ 4529050	KCP Kebon Jeruk	☎ 5329511	KCP Cimone	☎ 55770145	KK Bandara Benda	☎ 55611171
KCP Fatmawati	☎ 7210560	KCP Matraman	☎ 85918033				





Lampiran 16

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surat Perintah Setor (SPS)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK  
J. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok DPOK, 151-770000

**Surat Perintah Setor**  
Nomor Berkas Permohonan /3190 / 2022

Sesuai dengan permohonan saudara :

Nama Permohonan : H-HIDAI I H JAHRI  
 Nama : J. GARDU NO.19 B  
 an Permohonan : PT. BANK JASA JAKARTA

Maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan rincian sbb :

No	Uraian Pekerjaan	Utang/Unit/Luas(m2)	Uang (Rp)
1	Penyelenggaraan Kegiatan Pengurusan dan Pendaftaran Tanah	1	355.000
		<b>Jumlah</b>	<b>355.000</b>

Tertimbang : // Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu //

Desa/Kelurahan : BEDAHAN  
 Kecamatan : SAWANGAN  
 Ales Hak : Hak Cuse Bangunan No. 10.27.02.02.3.04385

DEPOK, 15 Juli 2022  
 Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan  
 KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK  
 Perogoes I pakt  
  
 Nanda Lis Putri  
 NP - 1993091010000000

QR Code: 

Pembayarannya :

1. Apsa yang akan dibayar pada 1 hari yang telah ditetapkan sebelum pembayarannya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
2. Pembayaran juga dapat dilakukan di ATM BANK dengan KUDL PLMURAYAN SIMPONI: 020220719546693 sebelum 15.59.41

<https://ksp2.atpns-gs.wvlns/Pencetakan>